

PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Zaenal Arifin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

This research deeply discusses about implementation of community participation in the education management in Primary School (SD) and Islamic Primary School (MI) in Sidoarjo District, in East Java especially related to the participation processes, forms or models, levels or strata and functions, the obstacles or problems and the supports factors, and how to overcome all problems, and to find alternative participation implementation models. Moreover, this research follows Moeover, this research infolved School Commite, Head Master, and Community leader in 18 Sub Distrcts in Sidoarjo District of East Java Indonesia. The conclusion and suggestions, of the research can be seen as follow : Community Participation in Edication Management has functions as : (1) Community fund rising; (2) the improvement of community attention and commitment; (3) the improvement of parent and community participation to make a better quality of education; and (4) the evaluation and supervision of education policy and the product of education. The opstacles of the community participation in education management are : (1) In Planning; (2) In Organizing and implementing; and (3) In monitoring and evaluation. The supporting factors are : (1) In planning and monitoring by using School Website; (2) BOS/BOSDA (School Operatinal Fund)very helpful for the poor parents to reduce the school payment;(3) Teacher SertificationPrograme give positif impact to increase the spirit of teaching and learning process in the shool.Suggestions/Recommendations are : (1) School Commity needs reposition; (2) School need democracy improvement; (3) School needs improvement of tranparancy, acuntability, and responsiveness; (4) School needs improvement of cooperation with Higher Education; (5) District Government should give Recommendation Easily for the CSR (Corporate Social Responsibility) programe; (6) School Commity needs support from everybody to the positif effort for better quality of education; (7) To know deeper about the positive impacts of Website or the development of Information, Communication, and Technology (ICT) in Education Management, needs further and deeper research mus be done.

Key words : “Community Participation”.

1. PENDAHULUAN.

Latar Belakang

Dewasa ini, kondisi pendidikan di Indonesia dalam keadaan memprihatinkan apabila dilihat dari kualitas dan tantangan global yang harus dihadapi. Hal ini bisa dilihat dari sisi kualitas guru di mana masih banyak guru-guru yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan sesuai tuntutan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu minimal S1 atau D4. Data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 menunjukkan sebanyak \pm 205.000 guru atau sebanyak \pm 33 % belum S1-D4. Sementara itu, guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 129.494 guru atau + 20 % dari guru yang sudah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Demikian pula rata-rata lama pendidikan penduduk Jawa Timur atau *mean years schooling* baru mencapai 7,9. Masih sering kita dengar adanya Gedung Sekolah yang kondisinya memprihatinkan atau tidak layak dipakai sebagai tempat pembelajaran.khususnya pada SD/MI. Sedangkan di era globalisasi yang sedang berkembang diperlukan peningkatan kualitas pendidikan secara terus menerus. Pembaruan di bidang pendidikan memerlukan keberanian untuk mencari metode dan membangun paradigma baru.

Dalam abad ke dua puluh satu ini, fenomena kehidupan yang amat penting, yakni adanya globalisasi hampir pada semua aspek kehidupan. Konsekuensinya, bagi semua bentuk pekerjaan, di antaranya dunia pendidikan memiliki tantangan yang bersifat mendunia, akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Profesionalisme harus diciptakan untuk menghadapi tantangan tersebut misalnya tantangan/target kinerja yang dikeluarkan oleh MDG's, HDI, dll.

Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, transparansi manajemen sekolah serta tetap eksisnya dewan guru dalam kegiatan pembelajaran yang didukung oleh adanya kebijakan otonomi daerah serta desentralisasi pendidikan, sehingga sekolah mempunyai otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan yang sangat jauh berbeda dengan sistem sentralistik sebelumnya.

Peningkatan kualitas pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari peningkatan mutu Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah bahkan juga peningkatan mutu pendidikan pra sekolah. Hal ini merupakan mata rantai untuk menuju sumber daya yang berkualitas. Dengan kata lain, peningkatan kualitas Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah merupakan kondisi mutlak yang harus diwujudkan. Tanggung jawab peningkatan mutu tidak hanya dari pemerintah dengan berbagai kebijakannya tetapi juga pada sekolah, orang tua dan partisipasi masyarakat. Kerjasama antar mereka sebagai *partnership* akan menentukan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Karena penelitian ini sebagai lanjutan dari penelitian terdahulu tentang implementasi kebijakan MBS dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pendidikan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, (yang dilakukan oleh Sdr. Rasio tahun 2005), yang salah satu ciri dari MBS dimaksud adalah adanya *partisipasi masyarakat* maka penelitian ini dimaksudkan untuk melihat lebih jauh dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu, pengambilan lokus SD/MI di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dalam penelitian kami adalah dalam rangka menjaga konsistensi lokus dari lokus penelitian sebelumnya.

Di samping itu, Sidoarjo termasuk Unik, karena sekalipun Kabupaten Sidoarjo secara geografis berdampingan dan sebagai Kabupaten penyangga kota metropolitan Surabaya dan Angka Partisipasi Kasar SD/MI tergolong tinggi dan sudah tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta sudah memulai program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun sejak tahun 2006 yang lalu, .tetapi ternyata Kabupaten Sidoarjo belum mampu memiliki SD/MI Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).Rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang tersebut adalah :“Bagaimanakah partisipasi masyarakat di bidang manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, baik yang terkait dengan proses, bentuk, tingkatan dan fungsi partisipasi masyarakat maupun faktor-faktor penghambat dan pendukungnya?

Kebijakan MBS belum ditransformasikan atau dikomunikasikan secara efektif kepada para pelaksana kebijakan pada tingkat sekolah. Sementara itu, pada dua tahapan lain, yakni tahapan pengorganisasian dan aplikasi, kebijakan MBS telah diterapkan cukup baik pada sekolah. Karakteristik demokrasi, akuntabilitas, responsibilitas, responsivitas, transparansi dan keterbukaan, *partisipai masyarakat*, dan pembelajaran PAKEM telah berkembang di sekolah yang berarti telah dilaksanakan cukup baik oleh sekolah. Hal ini dapat terjadi karena sekolah lebih banyak berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah, memperoleh sumber dana dan bantuan teknis atau program, dan disposisi untuk melaksanakan berbagai kegiatan; tanpa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan landasan teori Administrasi Publik sebagai *grand theory*, “Good Governance” sebagai *middle range theory*, dan Partisipasi Masyarakat dibidang Manajemen Pendidikan sebagai *applied theory*.

Kerangka Konsep dan Metode Penelitian

Kerangka Konsep Penelitian

Peningkatan mutu pendidikan bukan hanya menjadi tugas pengelola sekolah, akan tetapi menjadi kewajiban semua komponen masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya sekolah hanya merupakan bagian kecil dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Berangkat dari hal di atas, maka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Kerangka Konsep Penelitian



2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan *observasional*, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mempelajari gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat (Moleong, 2000: 14). Pendekatan penelitian ini dipilih, karena yang dipelajari dalam penelitian ini menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan pengamatan berperan serta (*participant observation*) atau menurut Moleong “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati orang-orang atau lembaga yang diteliti (Moleong, 2000:5).” Sedangkan studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah suatu penelitian empirik yang menyelidiki suatu gejala kontemporer dalam latar kehidupan nyata.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, di mana masalah penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, luwes dan mengikuti pola pikir yang bersifat empiris, di mana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan (Moleong, 2000:62-63). Dengan kejelasan data dan kemampuan fokus, peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana data yang

tidakperluataubahkanharusdibuang. Dengan focus
penelitiantidakakanterjebakolehmelimpahnya volume data di lapangan.

Dalampenelitianiniditikberatkanpadapartisipasimasyarakat di
bidangmanajemenpendidikandalampeningkatankualitaspendidikanpadaSekolahDasard
an Madrasah Ibtidaiyah, meliputi:

1. Menggambarkan proses, bentuk, tingkatan dan fungsi partisipasimasyarakat di
bidangmanajemenpendidikandalampeningkatan kualitas pendidikan, meliputi:
 - Kebijakan manajemen pengelolaan sekolah;
 - Proses kegiatan pembelajaran;
 - Partisipasi masyarakat/*stakeholder*.
2. Menggambarkan dan menganalisis peran *stake holder* dalam pelaksanaan partisipasi
masyarakat di bidang manajemen pendidikan dalam peningkatan kualitas
pendidikan.
3. Menggambarkan factor-faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam
manajemen pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.

LokasiPenelitian

Sesuai dengan tema dalam penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo, dengan pertimbangan:

1. Kemampuan manajerial Kepala Sekolah dalam mengelola sekolahtermasuk proses
pembelajarannya;
2. Partisipasi masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sidoarjo;
3. Kedekatan peneliti dengan lokasi penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian lebih
efektif.
4. Sebagai kelanjutan dari penelitian sebelumnya atau untuk menjaga konsistensi
dengan substansi penelitian sebelumnya.

TeknikPengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi
sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*indepth Interview*)

Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur dan pernyataan yang
memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap
dan mendalam. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi ini telah
mampu mengorek kejujuran dan keobyektifan informan untuk memberikan apa
yang sebenarnya. Untuk menghindari bias informasi, peneliti melengkapi dengan
instrumen alat perekam dengan seizin informan, agar data dan informasi dapat
ditangkap secara utuh.

Wawancara yang telah dilakukan tidak hanya di kantor tetapi juga dilakukan di rumah maupun di tempat yang disepakati bersama. Hal ini dilakukan agar peluang waktu dan saat yang tepat untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang partisipasi masyarakat di bidang manajemen dalam peningkatan mutu pendidikan.

2. Observasi

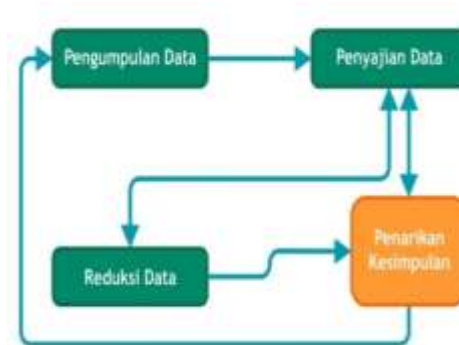
Teknik observasi baik secara langsung maupun tidak langsung atau secara formal maupun informal digunakan untuk mengamati berbagai kegiatan yang ada di desa. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi data primer di lapangan dan sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya, maupun data sekunder dari Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sidoarjo ataupun berasal dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, keputusan-keputusan, arsip, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perumusan masalah ataupun fokus penelitian.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:15-20), menggunakan analisis model interaktif dengan tiga prosedur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Prosedur analisis dengan 3 (tiga) fase tersebut digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992:22) yang disebut sebagai “*model interaktif*” seperti digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Miles & Huberman, 1992

3. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini dititikberatkan pada partisipasi masyarakat di bidang manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo, meliputi:

1. Menggambarkan proses, bentuk, tingkatan dan fungsi partisipasi masyarakat di bidang manajemen pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan.
2. Menggambarkan dan menganalisis peran *stakeholder* dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat di bidang manajemen pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan.
3. Menggambarkan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Sesuai dengan tema dalam penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo, dengan pertimbangan:

1. Kemampuan manajerial Kepala Sekolah dalam mengelola sekolah termasuk proses pembelajarannya;
2. Partisipasi masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sidoarjo;
3. Kedekatan peneliti dengan lokasi penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian lebih efektif.
4. Sebagai kelanjutan dari penelitian sebelumnya atau untuk menjaga konsistensi dengan substansi penelitian sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*indepth Interview*) Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur kepada 18 (delapan belas) orang Kepala Sekolah, 18 (delapan belas) orang Komite Sekolah maupun beberapa orang tokoh masyarakat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2011 serta pernyataan yang memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi ini telah mampu mengorek kejujuran dan keobyektifan informan untuk memberikan apa yang sebenarnya. Untuk menghindari bias informasi, *peneliti melengkapi dengan instrumen alat perekam dengan seizin informan, agar data dan informasi dapat ditangkap secara utuh.*

Wawancara yang telah dilakukan kepada pada 18 (delapan belas) orang Kepala Sekolah, 18 (delapan belas) orang Komite Sekolah maupun beberapa orang tokoh masyarakat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2011 tidak hanya di kantor tetapi juga dilakukakan di rumah maupun di tempat yang disepakati bersama. Hal ini dilakukan

agar peluang waktu dan saat yang tepat untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang informasi kebijakan pendidikan dasar.

Proses Partisipasi Masyarakat.

Proses Partisipasi Masyarakat pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan. Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut diatas nampak bahwa proses partisipasi masyarakat yang dibangun baik oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah maupun tokoh masyarakat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyatakan bahwa *“strategi pengorganisasian sekolah dalam penyusunan perencanaan program sekolah, dimana kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah melakukan posisi tawar dan terus menerus berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan, lebih disukai daripada mobilisasi oleh Sekolah sebelum mengupayakan masyarakat untuk terlibat didalam perencanaan program kerja di Sekolah kemudian mengharapkan masyarakat untuk terlibat di dalamnya walaupun dalam derajat yang paling rendah (baca : pasif), dengan satu penekanan utama : tidak boleh menentang program yang sudah dirancang oleh Sekolah lebih disukai daripada strategi pemberdayaan yang dilakukan Sekolah, dengan mencoba melakukan penyadaran kepada masyarakat agar menyadari hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sehingga mampu melakukan kontrol terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang terkait dengan mereka”*, (Catatan: Dalam operasionalnya strategi ini memposisikan kekuatan ketiga sebagai fasilitator penyadaran masyarakat, karena tanpa memerankan kekuatan ketiga dimaksud masyarakat cenderung tetap berada dalam alam kesadaran palsu).

Bentuk Partisipasi Masyarakat.

Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan. Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut diatas nampak bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dibangun baik oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyatakan bahwa bentuk Partisipasi Masyarakat secara umum adalah memperhatikan/ menyerap dan memberikan tanggapan informasi, baik dalam arti menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya itu *lebih disukai* daripada bentuk partisipasi masyarakat melalui kontak dengan pihak lain dalam hal ini dengan sekolah dan stakeholder yang lain dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan sekolah demikian juga untuk bentuk partisipasi masyarakat dalam dalam pelaksanaan pembangunan sekolah termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana), perasaan terlibat dalam pembangunan sekolah termasuk keputusan menyangkut nasib mereka dan partisipasi dalam hal bersifat teknis.

TingkatanPartisipasi Masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan. Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut diatas nampak bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang dibangun baik oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyatakan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat secara umum berturut-turut paling tinggi/atas (*citizen controle*) (Catatan: Derajat/kualitas partisipasi masyarakat pada tingkat paling atas yaitu *citizen power* (*citizen controle, delegate power, dan partnership*) ternyata justru memiliki derajat/kualitas partisipasi yang paling berat/baik, sementara pada tingkat paling bawah (*manipulation*) memiliki derajat/kualitas paling ringan) kemudian diikuti keterlibatannya pada level *consultation* dan keterlibatannya pada level *joint planning*.

Fungsi Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan

Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan. Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut diatas nampak bahwa partisipasi masyarakat yang dibangun baik oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah maupun tokoh masyarakat.tokoh agama pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Manajemen Pendidikan secara umum berurutan dari fungsi menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan fungsi mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan serta fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan oleh Komite Sekolah dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat .dalam Manajemen Pendidikan oleh Komite Sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan. Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut diatas nampak bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan oleh Komite Sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo secara umum sebagai Komite Sekolah pernah merasakan adanya hambatan pada saat merencanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu misalnya kebijakan dalam menentukan RAPBS terjadi tarik menarik kepentingan antara urusan rutin dan urusan pembangunan fisik

lebih dominan dibandingkan faktor penghambat pada saat mengorganisir dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu, dan melaksanakan manajemen pendidikan yang bermutu serta pada saat mengawasi penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu.

Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan oleh Komite Sekolah dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat .dalam Manajemen Pendidikan oleh Komite Sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan. Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut diatas nampak bahwa faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan oleh Komite Sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo secara umum *“sebagai Komite Sekolah pernah merasakan adanya faktor pendukung pada saat merencanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu dan pada saat faktor pendukung pada saat mengawasi penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu, misalnya dengan dibuatnya Website Sekolah yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh masyarakat terutama oleh Komite Sekolah”*. Website merupakan wujud konkret dari program e-government dalam bidang pendidikan yang lebih kuat pengaruhnya dibandingkan faktor pendukung pada saat mengorganisir dan faktor pendukung pada saat melaksanakan penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu.

Pembentukan FGD sebagai wadah Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Berkaitan dengan hasil temu Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat serta unsur UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan topik *“Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan”* pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Propimnsi Jawa Timur yang dihadiri oleh 12 Kepala Sekolah dan 12 Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat serta 6 orang staf UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang menghasilkan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses partisipasi masyarakat oleh *Komite Sekolah* pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo *melakukan posisi tawar dan terus menerus serta berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan, kemudian mengharapka masyarakat untuk terlibat di dalamnya*

Partisipasi Masyarakat Di Bidang Manajemen Pendidikan Dalam Rangka
Peningkatan Mutu Pendidikan

- 2) Bentuk partisipasi masyarakat pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo adalah memperhatikan/ menyerap dan memberikan tanggapan informasi.
- 3) Elemen partisipasi masyarakat pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo adalah berturut-turut ikut-serta dalam mengawasi dan menilai kegiatan-kegiatan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang sedang dan telah dicapai oleh sekolah,
- 4) Tingkat partisipasi masyarakat yang dibangun baik oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo ialah *citizen power (citizen controle, delegate power, dan partnership)*
- 5) Partisipasi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dalam Manajemen Pendidikan adalah fungsi menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan fungsi mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan serta evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 6) Faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dalam manajemen pendidikan oleh Komite Sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo ialah pada saat merencanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu misalnya kebijakan dalam menentukan RAPBS terjadi tarik menarik kepentingan antara urusan rutin dan urusan pembangunan fisik lebih dominan dibandingkan faktor penghambat pada saat mengorganisir dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu, dan melaksanakan manajemen pendidikan yang bermutu serta pada saat mengawasi penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu.
- 7) Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan oleh Komite Sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini *adanya Website Sekolah yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh masyarakat terutama oleh Komite Sekolah*.. Karena Website merupakan wujud konkret dari program e-government dalam bidang pendidikan yang lebih kuat pengaruhnya dibandingkan faktor pendukung pada saat mengorganisir dan faktor pendukung pada saat melaksanakan penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu.

4. KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penyajian dan analisis pada bab sebelumnya maka partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dinyatakan sebagai berikut :

1. Proses partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dibangun baik oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo adalah menggunakan strategi pengorganisasian sekolah dalam penyusunan perencanaan program sekolah, dimana kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah. melakukan posisi tawar dan terus menerus berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan lebih disukai daripada mobilisasi oleh Sekolah sebelum mengupayakan masyarakat untuk terlibat didalam perencanaan program kerja di Sekolah kemudian mengharapkan masyarakat untuk terlibat di dalamnya walaupun dalam derajat yang paling rendah (baca : pasif), dengan satu Penekanan utama : tidak boleh menentang program yang sudah dirancang oleh Sekolah serta lebih disukai daripada strategi pemberdayaan yang dilakukan Sekolah, dengan mencoba melakukan penyadaran kepada masyarakat agar menyadari hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sehingga mampu melakukan kontrol terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang terkait dengan mereka. (Catatan: Dalam operasionalnya strategi ini memposisikan kekuatan ketiga sebagai fasilitator penyadaran masyarakat, karena tanpa memerankan kekuatan ketiga dimaksud masyarakat cenderung tetap berada dalam alam kesadaran palsu).
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dibangun baik oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat secara umum adalah memperhatikan/ menyerap dan memberikan tanggapan informasi, baik dalam arti menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya, lebih disukai daripada bentuk partisipasi masyarakat melalui kontak dengan pihak lain dalam hal ini dengan sekolah dan stakeholder yang lain dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan sekolah demikian juga untuk bentuk partisipasi masyarakat dalam dalam pelaksanaan pembangunan sekolah termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana), perasaan terlibat dalam pembangunan sekolah termasuk keputusan menyangkut nasib mereka dan partisipasi dalam hal bersifat teknis.

Partisipasi Masyarakat Di Bidang Manajemen Pendidikan Dalam Rangka
Peningkatan Mutu Pendidikan

3. Tingkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dibangun baik oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo adalah tingkatan partisipasi masyarakat secara umum berturut-turut paling tinggi/atas *citizen controle* kemudian diikuti keterlibatannya pada level *manipulation*, kemudian *consultation* dan keterlibatannya pada level *joint planning*.
4. Fungsi Partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dibangun baik oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo adalah secara umum berurutan dari fungsi menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan fungsi mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan serta fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
5. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan oleh Komite Sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo secara umum adalah adanya hambatan pada saat merencanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan hambatan pada saat mengorganisir dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu, dan melaksanakan manajemen pendidikan yang bermutu serta pada saat mengawasi penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu. Hambatan pada saat merencanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu, misalnya saja peran komite sekolah yang hanya sekedar menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Sekolah dalam membuat kebijakan penyusunan RAPBS, artinya ada Komite Sekolah yang hanya tinggal tanda tangan saja tanpa mau berpikir panjang tentang bagaimana merencanakan manajemen pendidikan yang bermutu.
6. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan oleh Komite Sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo secara umum pada saat merencanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu dan pada saat mengawasi penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu, antara lain dengan dibuatnya Website Sekolah yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh masyarakat terutama oleh Komite Sekolah. Website ini merupakan wujud konkret dari e-government dalam bidang pendidikan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan faktor pendukung pada saat mengorganisir dan faktor pendukung pada saat melaksanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang

bermutu. Pemanfaatan ICT sebagai sarana PSB dan perbaikan sistem Pembelajaran; serta pembentukan jejaring (*networking*) antar satuan pendidikan Pemanfaatan ICT sebagai sarana PSB dan perbaikan sistem Pembelajaran; serta pembentukan jejaring (*networking*) antar satuan pendidikan SD.MI di Sidoarjo.

Disamping itu dengan dikeluarkannya kebijakan BOS dan BOSDA (Madin/Guru swasta), maka membuat orangtua dan siswa terbantu dalam pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu alasan rendahnya partisipasi masyarakat atau partisipasi pendidikan, khususnya pada kelompok masyarakat miskin, adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo, meliputi:

- a) peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kemajuan sekolah, khususnya dukungan moril dan material,
- b) peningkatan kesejahteraan guru,
- c) pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran,
- d) pengawasan terhadap program pendidikan di sekolah. Upaya-upaya tersebut sudah dilakukan Komite Sekolah secara maksimal sesuai dengan kemampuan pengurus Komite Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dinyatakan sebagai berikut :

1. Diperlukan reposisi peran komite sekolah baik di Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo;
2. Melakukan pembudayaan prinsip demokratisasi di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dalam menggali partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
3. Melakukan peningkatan transparansi, akuntabilitas dan responsivness dalam manajemen pendidikan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dengan memanfaatkan perkembangan ICT secara baik;
4. Kerjasama dengan lembaga pendidikan baik yang sejenis ataupun dengan Perguruan Tinggi dalam upaya menggali potensi masyarakat sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
5. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo supaya memberikan kemudahan rekomendasi bagi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dalam menggali partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan

mutu pendidikan, termasuk mencari dana di perusahaan baik perusahaan negara maupun perusahaan daerah serta perusahaan swasta sebagai mitra kerja pendidikan terutama sekali melalui *CSR (Corporate Social Responsibility)* Perusahaan yang sudah ada baik di wilayah Kabupaten Sidoarjo maupun daerah kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Timur terutama sekali untuk pembuatan dan pengembangan Website Lembaga Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo dan terobosan-terobosan lain sebagai upaya terobosan global dalam menggali partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

6. Upaya Komite Sekolah dalam menggali partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan khususnya pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.
7. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan TIK dalam peningkatan mutu manajemen pendidikan, mengingat kecenderungan penggunaan TIK melalui dunia maya menjadi dominan sebagai wahana partisipasi masyarakat di bidang pendidikan khususnya manajemen pendidikan di era globalisasi.

Implikasi Teoritik dan Praktis

Implikasi Teoritis

Dalam perspektif pengembangan teori, penelitian ini dapat dianggap sebagai pengembangan teori Administrasi Publik sebagai Manajemen Publik, (Owen E. Hughes (1998) dalam bukunya yang berjudul *Public Management and Administration*) khususnya teori tentang manajemen pendidikan. Dalam kaitan dengan manajemen pendidikan, pengembangan teori Administrasi Publik tersebut akan berimplikasi pada pengembangan administrasi publik sebagai manajemen public.

Konsekuensi dari “administrasi publik” sebagai “manajemen publik” secara epistemologis juga berpengaruh terhadap cara bagaimana ilmuwan administrasi publik ke depan mengembangkan ilmu ini.

Untuk itu di masa depan ilmuwan administrasi publik harus memahami:

- (1) semakin meningkatnya tekanan terhadap sektor publik untuk melakukan restrukturisasi dan menyerahkan urusan kepada sektor swasta; (2)
- (2) bagaimana membuat keputusan yang secara ekonomis menguntungkan dengan mempelajari *public choice theory, principal/agent theory* dan *transaction cost theory*;
- (3) perubahan-perubahan lingkungan di sektor swasta seperti kompetisi yang semakin meningkat dan globalisasi; dan

- (4) terjadinya perubahan teknologi informasi yang dapat membantu manajer publik untuk menyelesaikan berbagai persoalan mereka sehingga ilmuwan manajemen publik ke depan harus belajar (dan memahami serta menguasai) perkembangan teknologi informasi untuk diadopsi menjadi *e-government* (Hughes, 1998: 8-18).

Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini membawa implikasi praktis bahwa partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dibangun baik oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo secara berurutan berfungsi menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan serta evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Selain itu, penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut secara lebih mendalam menyangkut faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan oleh Komite Sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidoarjo secara umum pada saat merencanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu dan pada saat mengawasi penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu, misalnya tentang ICT.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. 2001, *Pemetaan Persepsi Stakeholders : Kasus Peremajaan Pasar Nagari di Lubuk Alung Padang Pariaman, Sumatera Barat*, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Abdul Wahab, Solichin, 1991, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- , 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 1994, *Esensi Nilai Dalam Kebijaksanaan : Perbandingan Teoritikal*, dalam Z.A. Achmady dkk, 1996, *Kebijakan Publik dan Pembangunan*, IKIP Malang dan FIA Universitas Brawijaya, Malang.
- Achmad, DS., 2000, *Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar*, LPM ITB, Bandung.
- Anderson, 1979, *Public Policy Analysis, An Introduction*, Prentice Hall, Inc, Englewood Clifft.

Partisipasi Masyarakat Di Bidang Manajemen Pendidikan Dalam Rangka
Peningkatan Mutu Pendidikan

- Appleby, Paul (1945), *Government is Different from Big Democracy*. New York : Alfred A. Knopf as reprinted in Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde, *Classics of Public Administration*, 2nd edition, revised and expanded. Public Grove, CA : Brooks/Cole Publishing Company, 1987.
- BintoroTjokroamidjoo, 2005 *SistemPenyelenggaraanPemerintahan Negara, SistemAdministrasi Negara Republik Indonesia*, LembagaAdministrasi Negara, Jakarta 2005
- Brennen, Julia, 1997, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, Samarinda.
- Charles Dobson, *A Guide to Building Community*, Vancouver Citizent Committee, 2006.
- Depdikbud, 1999, *Pedoman Peningkatan Partisipasi Masyarakat*, Dikdasmen, Depdikbud, Jakarta.
- Dunn, William, N., *Analisa Kebijakan Publik*, terjemahan Muhadjir Darwin, Harmindata, Yogyakarta.
- Dye, Thomas, R., 1987, *Understanding Public Policy*, fourth edition, Prentice Hall Inc., Englewood, Cliff, New Jersey.
- Etzioni, Amitai, 1985, *Organisasi-organisasi Modern*, terjemahan Suryatin, UI Press, Jakarta.
- Fayol, Henry. *Administration Industrielle et Generable :PrevoyanceOrganisation, Commandement, Coordination Controle*. Paris : Dun, 1961.
- Frank J. 1900, *Politics and Administration*.DalamShafritz, J. M and Albert C. Hyde, 1997 four edition.Clastic of Public administration. Harcourt Brace College Publisher, halaman : 27-29.
- Goerl, Gary, Sl., 1980, *Human Capital, Atheoretical Approach and Empirical Analysis With Special Refencence to Education*, New York Columbia, University Press.
- Goodnow, Frank Johnson, 1859-1939, *Politic and Administration*.New York Macmillan Co. : London, Macmillan & Co., 1900.
- Habib, Ahamad, 1999, *Makalah tentang Perubahan Sosial Politik dan Budaya Menjelang Tahun 2000 di Malang*.
- Hadjon, P.M. et.al.,*PengantarHukumAdministrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.
- Hogwood, Brian, W., Lewis A. Gunn, 1986, *Policy Analysis*, British Journal of Political Science.
- Herbert A. Simon, *Public Administration Review*, Vol. 6, No. 1. (Winter, 1946), pp. 53-67.
- Hood, C., 1991, *A Public Adiministration for All Season*.Public Administration, Vol. 1 69 : 3-19
- <http://www.suparlan.com/pages/posts/beberapatemuanhasilpenelitiantentangmbs-manajemenberbasissekolah>.tanggal 20 Juli 2010.

- <http://scribd.artepic.com/c4/2437661/?=PENGERTIANMANAJEMEN++> LUTHER GULLICK tanggal 20-Juli-2010
- Huntington, S.P. & Nelson, J. (1977). *No easy choice political participation in developing countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Husaini Usman. (2004). *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- John M. Cohen dan Norman T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation : Concept and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Rural Development Monograph No. 2 Cornell University.
- Jones, Charles O., 1994, Editor Nashir Budiman, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, CV Rajawali Press, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1981, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta : Dunia Pustaka LAN-BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governnance*, Jakarta, LANRI
- Laode Ida. *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, Dan Clean Governement*. Jakarta: PSPK, 2002.
- Lofland, John & Lyn H. Lofland, 1984, *Social Settings : A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont, Cal : Wadsword Publishing Company.
- Miles, B. Matthew & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative data Analysis, A Sourcebook Of New Methods*, SAGE Publication Inc. Beverly Hills California.
- Mindarti, L.I. 2005, *Revolusi Administrasi Publik Aneka Pendekatan dan Teori Dasar*, Malang : Partner press.
- Moenir, HAS, 1998, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan kedelapan, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nana, Sudjana, 1998, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Nanang, Fatah, 2000, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: BinaAksara.
- Oemar Hamalik, 1980, *Sistem Pengelolaan Kas : manajemen Pendidikan Dalam Rangka Inservice Education*, Rineka Karya Cipta, Jakarta.
- Osborne, David and Ted Gaebler, *Reinventing Government Reading, MA : A Plumebook*, 1992.
- Owen E. Huges, *Management and Administration : Macmillan Press* 1998.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Penerbit Cemerlang, Jakarta.

Partisipasi Masyarakat Di Bidang Manajemen Pendidikan Dalam Rangka
Peningkatan Mutu Pendidikan

- Pollit, Crishtopher, 1979, *Implementating Public Policy*, Washington DC., Congressional Wuartely Press.
- P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, 2001, Gunung Agung, Jakarta.
- Sastropoetro, Santoso, 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Shafritz J.M., ott J.S., dan A.C. Hyde, *Public Manajement : The Essential Reading*, Chicago, I, : Lyceum Books/Nelson-Hall Publisher, 1991.
- Surachmat, Winarno, 1989, *Metode, Teknik Penelitian*, LP3ES, Jakarta.
- Taylor, Frederick W. *Scientific Management. Testimony before the US House of Representatives*, 25 Januari, 1912.
- Thoha, Miftah, 1986, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, H.Bintoro, 2004, Reformasi Nasional : *Penyelenggaraan Good Governancedan Perwujudan Masyarakat Madani*.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Penerbit Citra Umbara, Bandung.
- UNDP, 1997, *Governnance for Suitable Development-A Policy Document*, New York : UNDP
- Utomo, Warsito, *AdministrasiPublik Negara*, Yogyakarta : PustakaPelajar, 2007.
- Wilson, Woodrow. *The Study of Administration*, dalam "Political Science Quaterly" 2, Juni 1987.
- Wite, Leonard D. *Introduction to the Study of Public Administration*. New York : MacMillan Publishing Company, 1926.
- Zauhar, Soesilo *AdministrasiPubliksebuahPerbincanganAwal*, Journal Administrasi Negara, Vol. I, No. 2 Maret 2001.

Alamat Kontak Peneliti : Zaenal Arifin Dispindik Provinsi Jatim (**HP: 08123272716**) atau Gmail : zaenal56@gmail.com atau zaenalarn@yahoo.com

